

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. KAI (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi perkertaapian, mulai beroperasi sejak tahun 1867. Layanan produk yang diberikan oleh PT. KAI yaitu pelayanan penumpang, angkutan barang, dan perusahaan aset. PT. KAI merupakan salah satu perusahaan BUMN di sektor transportasi dan pergudangan. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan yang bergerak di bidang perkeretaapian ini, melakukan privatisasi pada tahun 1998, maka sejak itu bentuk usahanya menjadi Perusahaan Terbuka (PT).

PT. KAI merupakan perusahaan BUMN yang diberi tugas untuk melaksanakan program PSO (*Public Service Obligation*). PSO adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk/jasa tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun BUMN yang diberikan tugas PSO yaitu BUMN yang bergerak di bidang transportasi dan komunikasi, seperti PT. KAI untuk tugas layanan jasa angkutan kereta api kelas ekonomi, PT. Pos Indonesia untuk tugas layanan jasa pos pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, PT. Pelayaran Nasional Indonesia untuk tugas layanan jasa angkutan laut kelas ekonomi, dan PT. TVRI untuk program penyiaran publik. Untuk PT. KAI, dana PSO diperuntukkan bagi Kereta Api Ekonomi jarak jauh, jarak sedang, dan jarak dekat. Pemanfaatan dana PSO tidak hanya diserahkan untuk pengadaan gerbong, tapi juga membangun jaringan fasilitas

pelayanan *ticketing* kereta api, khususnya bagi konsumen kelas ekonomi yang memiliki keterbatasan akses dan masih menggunakan cara manual.

Sejak tahun 2009 hingga saat ini, PT. KAI telah dan sedang mengalami perubahan yang sangat menonjol. Berbagai inovasi dan perbaikan layanan terus dilakukan PT. KAI untuk mengubah wajah perkeretaapian Indonesia. Kebijakan perusahaan diberlakukan untuk meraih kemajuan perkeretaapian dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, perusahaan mulai menerapkan kebijakan yang tegas bagi para karyawannya. Dari sisi eksternal, PT. KAI membenahi berbagai pelayanan kepada para pengguna jasa kereta api di Indonesia.

Dari berbagai perubahan yang dilakukan PT. KAI secara kontinyu, tercatat PT. KAI mampu membukukan laba bersih hingga mencapai Rp 425 miliar pada tahun 2012. Jumlah ini sangat jauh meningkat jika dibandingkan pada tahun 2008 yang merugi hingga Rp 83 miliar. Dengan usahanya yang giat dalam menghasilkan laba, PT. KAI sebagai BUMN berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Negara. Kontribusinya terhadap Negara, dilakukan dengan memberikan pelayanan jasa transportasi dan dengan menjalankan program PSO, PT. KAI diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PT. KAI memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut :

Visi PT. KAI yaitu :

Untuk menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*.

Misi PT. KAI yaitu :

Dengan menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan dan Kenyamanan (www.kereta-api.co.id).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Audit internal modern menyediakan jasa – jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, dan tata kelola (*governance*) perusahaan publik maupun privat. Aspek keuangan hanyalah salah satu aspek saja dalam lingkup pekerjaan audit internal. Pada masa tahun 1980 – 1990, audit internal pernah dianggap “lawan” pihak manajemen sekarang auditor internal mencoba menjalin kerja sama yang produktif denganklien melalui aktivitas –aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan (sawyers, 2005 :3).

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Adrian Sutedi, 2011:2).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar alam perekonomian Indonesia merupakan entitas ekonomi yang harus menjadi perhatian utama, mengingat BUMN memegang peranan yang penting bagi perkembangan perekonomian nasional. Dalam perkembangannya, BUMN saat ini memegang lima amanah peran sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2003. Salah satu yang dilakukan BUMN untuk mewujudkan peran dan amanahnya yaitu privatisasi. Dengan adanya ptivatisasi kepemilikan BUMN tidak seratus persen lagi milik pemerintah, tetapi sebagian telah dimiliki oleh pihak non pemerintah antara lain dimiliki oleh publik, manajemen, institusi dan asing. Dengan komposisi struktur kepemilikan seperti ini, maka diharapkan BUMN dapat menjalankan perannya secara efektif khususnya dalam hal memperbaiki pelaksanaan gcg dan meningkatkan kinerjanya (Kinerja BUMN, 2009 dalam Hanifah 2011).

Menurut Hanifah, dalam penelitiannya disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan gcg, diantaranya yaitu struktur kepemilikan, budaya organisasi, komite audit, dan audit internal. Dari hasil penelitiannya, Hanifah mengemukakan bahwa audit internal memiliki keberpengaruh terbesar dalam mewujudkan *good corporate governance* dibandingkan dengan faktor lainnya, sehingga audit internal merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance*. Penerapan gcg yang dilaksanakan dengan efektif, cenderung dapat meningkatkan kinerja keuangan BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN pelaksanaan gcg merupakan faktor paling utama yang harus diperhatikan oleh BUMN (Hanifa, 2011).

Menurut Nainggolan (2011), kinerja perusahaan dianggap berhasil jika mereka dapat mempertahankan hidup, memperoleh laba, dan berkembang. Untuk dapat mencapai ketiga cara tersebut organisasi harus melaksanakan *monitoring* secara kontinyu yang dilakukan oleh audit internal, sehingga harapan untuk memuaskan bagi semua kelompok yang berkepentingan dengan perusahaan dapat terwujud. Penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh audit internal terhadap kinerja perusahaan.

Dari penjelasan diatas nampak bahwa audit internal berperan dalam membantu meningkatkan kinerja perusahaan, begitu juga dengan penerapan *good corporate governance* yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan BUMN yang telah melakukan privatisasi dengan struktur kepemilikan yang tidak dimiliki oleh pemerintah sepenuhnya maka sudah seharusnya PT. KAI memperbaiki pelaksanaan gcg dan meningkatkan kinerjanya.

Penelitian mengenai *good corporate governance* yang dihubungkan dengan kinerja perusahaan sebenarnya telah beberapa kali dilakukan. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Supatmi, dikatakan bahwa belum tentu perusahaan yang memperoleh peringkat penerapan *good corporate governance* baik akan

memiliki kinerja keuangan yang baik pula. Terbukti secara statistik dalam penelitiannya bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap rasio keuangan diukur dengan menggunakan ROE (Supatmi, 2007). Sedangkan penelitian lainnya mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan (Retno, 2012). Dari kedua penelitian ini menimbulkan inkonsistensi mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio keuangan.

Pada tahun 2005, seperti yang diberitakan di situs Departemen Keuangan (www.anggaran.depkeu.go.id) PT. KAI sempat mengalami kasus tentang audit umum, kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas didalam menyajikan laporan keuangan yang tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang semestinya. Kasus ini bermula dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit. Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Perbedaan pandangan tersebut bersumber pada perbedaan pandangan mengenai masalah piutang PPN, masalah beban yang ditanggung yang berasal dari penurunan nilai persediaan, masalah persediaan dalam perjalanan, dan masalah uang muka gaji. Selain itu, pada tahun tersebut PT. KAI belum memiliki *Board Manual*. *Board manual* merupakan buku panduan bagi direksi maupun komisaris. Tetapi, setelah kasus audit umum tersebut diselesaikan, sampai tahun 2013 kinerja PT. KAI semakin baik. Bahkan pada tahun 2012, keuntungan perusahaan diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Kenaikkan kinerja keuangan PT. KAI juga dipicu dengan perubahan (arah) organisasi dari *product oriented* menjadi *customer focused*. Namun, pada tahun yang sama yakni tahun 2012 PT. KAI termasuk kedalam daftar 24 perusahaan BUMN yang berpotensi terkorup dan menduduki peringkat ke-19 seperti yang dilansir oleh situs pemberitaan, Tempo (www.id.berita.yahoo.com).

Kasus audit umum yang dialami PT. KAI di tahun 2005 tersebut, salah satu penyebabnya yaitu auditor internal yang tidak ikut berperan aktif dalam proses audit. Setelah kasus tersebut dapat terselesaikan, PT. KAI menunjukkan perubahan kinerja yang semakin membaik. Tetapi hal itu tidak sejalan dengan pemberitaan pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa PT. KAI termasuk daftar 24 perusahaan BUMN yang berpotensi terkorup.

Dari uraian diatas, serta fenomena yang ada, maka penulis berniat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Audit Internal dan Penerapan *Good Corporate Governanc* terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia)”**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana audit internal, penerapan *good corporate governance*, dan kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh audit internal secara parsial terhadap kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh penerapan *good corporate governance* secara parsial terhadap kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh audit internal dan penerapan *good corporate governance* secara bersama – sama (simultan) terhadap kinerja perusahaan PT. Kereta Api Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis audit internal, penerapan *good corporate governance*, dan kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh audit internal secara parsial terhadap kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* secara parsial terhadap kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh audit internal dan penerapan *good corporate governance* secara bersama – sama (simultan) terhadap kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori dalam bidang ilmu audit internal, khususnya pada perusahaan BUMN.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk saran kepada PT. Kereta Api Indonesia untuk dapat menjaga kualitas auditnya dalam mewujudkan gcg serta meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum PT. Kereta Api Indonesia, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka dan lingkup penelitian

Bab ini berisi tinjauan pustaka penelitian kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Sub bab tinjauan pustaka penelitian meliputi rangkuman teori dan penelitian teori.

Bab III Metode penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, variabel operasional, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini berisi karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi beberapa pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.